

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu ciri penting negara demokrasi adalah partisipasi warga negara. Pada intinya, demokrasi didasarkan pada gagasan bahwa setiap individu mempunyai kemampuan terbaik untuk memutuskan sendiri apa yang terbaik bagi kesejahteraannya. Kehidupan warga negara dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, yang mempengaruhi hak dan kebebasan mereka. Masyarakat mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan, dan setiap individu mempunyai hak untuk menentukan bagaimana keputusan tersebut diambil. Warga internal juga mempunyai dampak pada proses pengambilan keputusan. Sadar berpolitik adalah komponen penting dalam keterlibatan masyarakat dalam politik. Hal ini menyiratkan bahwa ketika masyarakat memperoleh lebih banyak informasi dan menjadi lebih sadar akan hubungan mereka dengan dunia di sekitar mereka, hak dan tanggung jawab mereka terkait dengan lingkungan, masyarakat, dan aktivitas politik akan meningkat sebanding dengan tingkat keterlibatan mereka. Setelah beberapa dekade penyelenggaraan pemilu nasional, Meskipun banyak masyarakat yang tidak terlalu menaruh perhatian terhadap pemilu, seperti terlihat di atas, mereka yang melakukan pemilu cenderung terlibat secara politik karena tingkat pengetahuan politik mereka dan keyakinan mereka akan kebutuhan akan pemerintahan. Jika masyarakat tidak memiliki informasi yang cukup dan mempunyai kepercayaan terhadap pemerintah, maka investasi mereka pada proses politik akan berkurang.

Ikut serta Sebagai tanda keikutsertaannya dalam demokrasi partai (pemilihan umum), warga negara suatu negara demokratis menunjukkan komitmennya dalam menjalankan dan menjunjung tinggi kekuasaan tertinggi negara (kedaulatan rakyat). Tingkat keterlibatan politik yang lebih besar menunjukkan bahwa masyarakat mengamati, memahami, dan berpartisipasi aktif dalam kenegaraan. Yang terjadi justru sebaliknya: rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu umumnya menunjukkan bahwa masyarakat tidak menghargai atau peduli

terhadap isu atau kegiatan kenegaraan. Ketika masyarakat berpartisipasi dalam pemilu pada tingkat rendah, hal itu mencerminkan sikap mereka terhadap kelompok kulit putih (golpu). Begini, karena tingkat keterlibatan merupakan sinyal dan indikasi yang sangat penting bagi proses demokrasi dan pencapaian kedaulatan rakyat, baik rendah maupun tinggi.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kabupaten Malang diselenggarakan secara langsung dan demokratis. Pemilihan tersebut juga dilakukan oleh organisasi independen, Komisi Dalam Pemilihan Umum (KPU). Hal Ini berfungsi sebagai organisasi perencanaan pemilu. Pada tanggal 9 Desember 2015, pemerintah memutuskan untuk menyelenggarakan pemilu serentak di seluruh daerah yang masa jabatannya akan diperpanjang pada tahun 2015. Pada saat yang sama, 26 kota, 170 kabupaten, dan 8 provinsi akan menyelenggarakan pemilihan walikota dan bupati. Pilkada mendatang antara lain akan dilaksanakan di Kabupaten Malang. Tiga calon bersaing memperebutkan posisi teratas di Kabupaten Malang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang mendatang. Lima partai politik di Kabupaten Malang— Nasdem , Golkar , PKB, dan Demokrat—mengusulkan tiga pasangan calon— Rendra dan Sanusi—sebagai bupati dan wakil bupati, dan ketiga pasangan tersebut lolos dari tahap verifikasi. Partai PDIP Kabupaten Malang juga mengukung Masrifah Hadi dan Dewanti Rumpoko untuk maju berpasangan pada posisi bupati dan wakil bupati. Selain itu, pasangan ketiga, Nurcholis dan Muhammad Mufidz , merupakan calon dari jalur perorangan. Ketiga pasangan ini akan bersaing memperebutkan posisi bupati dan wakil bupati pada Pilkada Malang 2015.

Peningkatan keterlibatan politik terlihat jelas jika dilihat dari kualitasnya. Pemilu tingkat pemula menyumbang sekitar 30% dari total pemilu. Semakin banyak orang yang sadar akan hak mereka untuk memilih dan tanggung jawab mereka untuk berpartisipasi dalam politik sesuai dengan tanggung jawab resmi mereka di pemerintahan, serta di masyarakat sipil dan sektor bisnis. Ini termasuk pemula yang baru belajar menggunakan suaranya. Ketiga elemen dasar ini saling bergantung pada agenda pemilu nasional dan lokal. Berdasarkan Rekap Pemilu 2015, total ada 1.020.227 surat suara yang dianggap sah. Bagi pemilih pemula , permasalahan terbesarnya adalah kurangnya kepercayaan terhadap politisi. Selain

itu, gejala menurunnya keterlibatan politik, khususnya di kalangan pemilih pemula, menjadi kekhawatiran dalam pemilihan Wakil Bupati dan Bupati, begitu pula dengan kendala dan kesulitannya. terkait dengan penyelenggaraan pemilu bagi pemula. Partisipasi pemilu oleh pemilih pemula merupakan langkah penting dalam mendidik generasi berikutnya tentang politik. Pada pemilihan Bupati dan Bupati Walil mendatang, sebagai pemilih pemula, kami mohon agar anda dapat menggunakan suara anda dalam memberikan suara. Bagi pemilih pemula, terdapat sejumlah kendala yang dapat menghalangi mereka untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu berikutnya. Selain tidak tertarik dengan jangkauan pemilu KPU, pemilih pemula juga masih terlalu muda untuk terpengaruh oleh kepentingan tertentu. (*Surat Keputusan Hasil Rekapitulasi Pilbup Tahun 2015.Pdf* , nd) .

Beliau pertama kali tampil sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) pada pelaksanaan tahun 1982. Pada masa reformasi, khususnya yang dikenal dengan Bawaslu , semua pihak yang terlibat harus mematuhi formalitas hukum yang ketat untuk memastikan pemilu diselenggarakan secara jujur dan adil.

Sering disebut dengan “partai” Kami sedang menerapkan demokrasi. Sederhananya, pemilu adalah fondasi pemerintahan demokratis di negara mana pun yang benar-benar meyakini pemilu. Pemilu merupakan wujud nyata demokrasi di Indonesia dan merupakan alat bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan atas pemerintahan dan negaranya. Pemilu berlandaskan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menyelenggarakan pemilunya berdasarkan asas: terbuka, langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (Wahdani (2018)

Salah satu cara agar demokrasi dan bentuk kedaulatan rakyat dapat berjalan adalah melalui proses pemilu, yang bertujuan untuk memilih pemimpin dan perwakilan yang akan berupaya meningkatkan kehidupan konstituennya. Seseorang yang termasuk dalam kategori pemilih “sangat menarik” telah memperhatikan detailnya dengan cermat dan masih merupakan pemilih pemula. Edukasi Pemilih Bagi Pendaftar Baru: Modul Pertama KPU Tahun 2013 Pemilih Pemula mengacu pada warga negara baru yang pertama kali menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu). Kategori ini mencakup penduduk tetap dan penduduk sementara

Indonesia (WNI). berusia 17 tahun atau lebih muda tetapi pernah menikah sebelumnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, mereka yang pertama kali menggunakan hak pilihnya, yang berumur 17 tahun ke atas, atau yang sedang atau pernah menikah, dianggap sebagai pemilih pemula. . Menurut ayat 1 dan 2 pasal 19 UU No. 10 Tahun 2008, hak memilih diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia yang telah menikah atau berumur minimal 17 tahun pada hari pemilu dan namanya tercantum dalam daftar pemilih yang disimpan oleh penyelenggara pemilu. Ringkasnya, pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang berusia antara 17 dan 21 tahun yang belum pernah memilih sebelumnya tetapi terdaftar pada penyelenggara pemilu dan berpartisipasi dalam pemilu terakhir. Mereka selalu diasumsikan belum pernah memilih dalam pemilu sebelumnya, sama seperti pemilih baru.

Kita tidak boleh berasumsi bahwa kurangnya pengalaman membatasi kemampuan seseorang untuk menyalurkan ambisi politik hanya karena masyarakat tidak memiliki pengalaman tersebut. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2), menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Kewajiban konstitusional adalah memenuhi kebutuhan kemajuan demokrasi seiring dengan pemekaran negara dan negara. Pemilihan umum yang cepat memberikan kebebasan bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya, yang menjalankan prinsip kedaulatan rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila memberikan landasan bagi penyelenggaraan negara yang demokratis, dan penyelenggaraan pemilihan umum langsung oleh rakyat merupakan salah satu cara untuk mewujudkan visi tersebut. Pemilihan umum yang transparan, diselenggarakan dengan baik, dan bertanggung jawab adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa semua pemilih yang memenuhi syarat mempunyai suara dalam proses tersebut. Menurut Primaidi dkk. (2019),

Dalam politik, khususnya politik pemilu, pemilih baru adalah objek sekaligus subjek. Partisipasi dalam politik dimungkinkan bagi pemilih pemula, yang di sini diartikan sebagai mereka yang belum menguasai seni perencanaan strategis untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Untuk memastikan mereka

tidak abstain dalam politik dalam penyelenggaraan pemilu, maka sebagai penerus bangsa, mereka harus mempunyai wawasan dan pemahaman di bidang politik, khususnya kegiatan pemilu. Memilih untuk tidak ikut serta merupakan sebuah pilihan yang ceroboh dan bisa saja mengancam kemajuan dan kelangsungan hidup negara dan negara kita. Jadi, masukan mereka akan menentukan kebijakan Indonesia ke depan, meskipun mereka baru memulai.

Para pemilih yang baru mengenal proses ini memerlukan pendidikan tentang makna dan praktik demokrasi dalam situasi ini. Apa yang mereka lakukan selama kegiatan pemilu bermanfaat bagi negara, dan mereka mengetahuinya. Dengan demikian, masyarakat menjadikan dirinya sebagai warga negara yang mempunyai kewajiban untuk menggunakan hak-haknya. Karena sebagian besar pemilih pemula kurang memiliki pengetahuan tentang politik, pendidikan politik diperlukan untuk membantu mereka mengambil keputusan yang tepat. Pemilih generasi Y berbeda dengan pemilih yang lebih tua dalam hal kepribadian, pendidikan, pengalaman hidup, dan kesulitan yang mereka hadapi. Asal usul mereka terutama dari kalangan pelajar, dan cenderung tinggal di perkotaan atau sekitarnya. Mereka sangat peka terhadap kemajuan teknologi dan menggunakan berbagai macam gadget, termasuk ponsel pintar, tablet, dan laptop. Selain itu, mereka memiliki pemahaman yang baik tentang tahapan dan jaringan media sosial, termasuk Facebook, Twitter, LinkedIn, dan banyak lainnya. Mereka mandiri, cepat menerima informasi baru, dan mudah menerima ide-ide baru. Permasalahan yang dihadapi oleh kelompok pemilih pemula adalah globalisasi, kebebasan perdagangan, terorisme, keterlibatan asing, dan isu-isu terkait lainnya yang telah lama menjadi sumber kemacetan politik dan kurangnya kemajuan menuju solusi. Khususnya untuk siap memilih pemilih yang cerdas, berjiwa muda, kritis, dan berorientasi masa depan, para pemula dalam proses pemilu perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang hal-hal berikut: perbedaan karakter dan sifat; latar belakang pengalaman dan kesulitan pemilih; dan fakta bahwa pemilih muda menghadapi kendala unik. Jika pengembang ini mengambil alih kepemimpinan, maka Republik Indonesia akan tetap ada pada tahun 2045, ketika nasib negara ditentukan oleh generasi muda melalui pemilu. (Lalolo, Krana Loina, Zonal, Munawaroh, 2018).

Membujuk mereka yang bisa memilih Partai politik mengandalkan dukungan generasi muda, yang berpengaruh dan penting dalam proses pemilu. Peserta politik Kandidat, pemilu, dan lingkup pengaruhnya Berburu pemilih Suara di masa mudanya Pemilu telah berlangsung selama dua tahun, dan sejauh ini banyak masukan dari pemilik usaha baru yang masuk ke dalam kampanye, jadi tidak ada banyak pendekatan berbeda untuk menjangkau pemilih muda. Kurangnya pengetahuan politik di kalangan pemilih muda, yang sering disebut sebagai pemilih pemula, merupakan hal yang perlu dibenahi jika kita ingin menarik perhatian mereka. Pengetahuan politik kelompok ini masih minim. Di masa lalu, hal ini efektif dalam memobilisasi kelompok kepentingan tertentu; misalnya, pemilih muda Hal ini biasanya ditujukan kepada calon pasangan tunggal yang menggunakan terminologi tertentu atau membawa banyak barang. Ada pemahaman mendalam tentang mengapa mereka harus memilih calon mitra melalui iklan masa perang di Tampa dan media sosial. (Nurcholis & Rizki Putra, 2020) .

Salah satu komponen sistem politik demokratis adalah pelaksanaan hak pilih oleh masyarakat umum. Tindakan menyelenggarakan pemilu mungkin merupakan tanda pemerintahan yang benar-benar demokratis. Alasannya adalah karena pemilu memungkinkan masyarakat umum untuk mempunyai suara dalam menentukan siapa yang memimpin suatu bangsa atau pemerintahan. Selain itu, pemilu memungkinkan masyarakat umum untuk memilih perwakilan di semua tingkat pemerintahan, termasuk presiden dan wakil presiden, serta anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan bahkan kepala negara bagian dan pemerintah daerah seperti walikota. dan bupati.

Penyelenggaraan pemilu pada tahun 2019 merupakan momen penting dalam sejarah pemilu di Indonesia. Pasalnya, seluruh lembaga pemerintahan baik presiden, wakil presiden, dan calon legislatif di DPR, DPD, provinsi, dan kota/daerah dipilih secara bersamaan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Akan ada kendala yang luar biasa dalam menyelenggarakan Pemilu 2020 secara langsung dan bersamaan dengan Pemilu 2020 untuk jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini membuat perebutan presiden dan wakil presiden menjadi sangat kontroversial, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketegangan di masyarakat.

Sederhananya, jika menyangkut politik suatu negara, tidak ada yang lebih penting daripada suara rakyat, yang paling banyak mereka ungkapkan langsung di kotak suara. Beberapa orang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum; kelompok ini dikenal sebagai pemilih pemula (17-21 tahun). Mereka belum pernah memberikan suara dalam pemilu sebelumnya. Namun bukan berarti Anda tidak bisa menyalurkan ambisi politik Anda karena kurangnya pengalaman. Pergi ke tempat pemungutan suara masih menjadi pilihan bagi mereka. Jika kita ingin pemilih pemula menjadi lebih dari sekedar “pemilih pemula” yang tidak tahu apa yang mereka lakukan, kita memerlukan pendidikan politik yang membentuk orientasi politik mereka dari waktu ke waktu melalui kepentingan mereka. Meningkatnya skeptisisme masyarakat terhadap informasi dan program partai yang ditawarkan masing-masing jurkam menjadi salah satu faktor penyebab pergeseran tersebut. Karena kebanyakan orang mendapatkan berita dari media, mudah bagi mereka untuk membuat perbandingan antara tokoh-tokoh yang berbeda. Cara pemilih memilih partai politiknya telah mengalami perubahan besar. Secara khusus, terdapat peningkatan demografi pemilih yang sangat bergantung pada jejaring sosial mereka, tumbuh bersama media, lebih mudah mengidentifikasi tokoh idola, dan lebih terbiasa menerima informasi dari media. Sumbernya adalah Rahman (2018).

Memang benar, pemilih pemula di sekolah menengah merupakan demografi berbeda yang sering kali memberikan kejutan dan, tentu saja, menawarkan kekuatan. Para pemilih yang baru mengenal proses ini menunjukkan tingkat kegembiraan yang luar biasa tinggi ketika mereka mencapai keputusan bulat, dan hal inilah yang memberi nama khas pada fenomena tersebut. suara yang baru memulai berpotensi menjadi swing vote yang sebenarnya. Iklim politik lokal yang terus berubah, dan bukan prinsip-prinsip intelektual yang mendasarinya, telah membentuk keputusan politik mereka. Terutama orang-orang terdekat mereka, seperti orang tua dan kerabat, mempunyai dampak terhadap minat pemilih muda yang belum berpengalaman. Mencermati sepak terjang pemilih pemula di berbagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), terungkap situasi tersebut. (Kunto, Adi Wibowo, dkk. pada tahun 2020).

Dalam rangka membangun negara atau daerah dan mensejahterakan kehidupan warganya di masa depan, pemilu merupakan pintu krusial yang berfungsi untuk melahirkan pemimpin dan/atau pengambil kebijakan yang hebat. Kekuasaan untuk memilih pemimpin sendiri berada di tangan rakyat, sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Dalam hal pergantian kepemimpinan, pemilu memberikan alternatif yang damai dibandingkan sistem monarki, kediktatoran, dan negara yang diperintah oleh militer. Agar suatu negara mempunyai kehidupan demokrasi dan politik yang berkualitas, maka pemilihan umum harus dilakukan secara JURDIL (jujur dan adil) dan LUBER (langsung, umum, bebas dan rahasia). Perlu diingat bahwa pemilih pemula merupakan kelompok demografis tertentu yang memiliki kemampuan untuk memberikan suara dalam jumlah besar pada pemilu nasional dan regional setelah perang, dan bahwa mereka juga menunjukkan perilaku politik yang berbeda. Referensi: Gleko dkk. (2017).

Salah satu alasan pemilih pemula tidak lebih sering memberikan suara adalah karena mereka belum memiliki pendidikan politik yang memadai, sehingga menyebabkan mereka tidak menyadari pentingnya menggunakan hak pilihnya. Data pemilu menunjukkan bahwa 43 persen pemilih pada tahun 2014 berusia di bawah 30 tahun, yang jelas menimbulkan risiko terhadap integritas pemilihan presiden dan wakil presiden. Jumlah pemilih muda yang berpartisipasi dalam pemilu sangatlah besar. Ketika pemilu jabatan bupati dan wakil bupati tahun 2020 bergulir, akan menjadi masalah jika pemilih pemula tidak berpartisipasi aktif dalam proses politik.

Pengetahuan politiknya, opini publiknya, dan tingkat keterlibatannya dengan pemerintah atau wakil rakyat merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatannya. Mengetahui hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara memerlukan ilmu adlah politik. Sejauh mana seseorang mempercayai dan terpengaruh oleh pemerintah ditentukan oleh sikap dan pandangannya terhadap pemerintah. Jika masyarakat mempunyai pengetahuan yang baik tentang politik dan memiliki keyakinan yang kuat mengenai peran pemerintah, mereka akan lebih mungkin untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik. Di sisi lain, jika tidak,

mereka cenderung mengamati proses-proses ini secara pasif. Dalam studi tahun 2019, Ardiani dkk.

Terdapat 5.035.887 pemilih pemula yang berusia antara 17 tahun pada tahun 2020, berdasarkan Daftar Penduduk Pemilih (DP4) yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Daftar tersebut mencakup periode 1 Januari 2018 hingga 17 April 2019. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan jajak pendapat yang menemukan bahwa 80 juta orang, atau sekitar 40% pemilih, merupakan generasi milenial atau pemilih pemula di pemilu. Pemilu serentak 2019. Mengingat jumlah pemilih pada pemilu secara keseluruhan sekitar 190 juta jiwa—sebagian besar generasi milenial masuk dalam kategori pemilih pemula. Oleh karena itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu, khususnya di tingkat daerah, perlu berupaya semaksimal mungkin dengan menyelenggarakan berbagai program kegiatan yang memberikan edukasi kepada pemilih baru mengenai politik dan mendorong mereka untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, seperti pemilu. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Pada saat yang sama, masih terdapat permasalahan dalam pemahaman pemilih pemula mengenai hak pilihnya dalam pemilu, yang merupakan tantangan serius bagi banyaknya pemilih pemula di Kabupaten Malang. Pasalnya, para pemilih pemula seringkali bersikap acuh tak acuh secara politik dan berpandangan bahwa pemilu nasional, khususnya pemilu presiden dan wakil presiden, tidak berdampak signifikan terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, pemilih pemula tidak diwajibkan untuk memberikan suara pada pemilu berikutnya.

(Studi tahun 2018 oleh Akhrani dan rekannya)

Melihat jumlah pemilih pada Pilkada Kabupaten Malang tahun 2020 mengungkap persoalan kurangnya pengalaman pemilih di kabupaten tersebut. Terdapat 4.500 pemilih pemula dalam pemilihan walikota, dan 31.760 di antaranya benar-benar memberikan suara (Radar Malang, 2019). Artinya, 13.200 orang yang berhak memilih untuk pertama kalinya tidak memberikan suara atau berkulit putih. KPU Kabupaten Malang mungkin bisa memanfaatkan jumlah yang besar tersebut sebagai bahan evaluasi atau pertimbangan.

Konsekuensinya, KPU Kabupaten Malang harus bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya, seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Malang, untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua kelompok ini dapat bekerja sama dengan mengorganisir kampanye penjangkauan berskala besar yang ditujukan kepada para pemilih pemula, dengan tujuan untuk mengajak lebih banyak orang datang ke tempat pemungutan suara dan meminta mereka menggunakan hak pilihnya. Pemilih pemula mungkin merupakan sasaran dari upaya ini. Hal tersebut menurut Setyawan dan Adiwidjaja (2013).

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kabupaten Malang diselenggarakan secara langsung dan demokratis. Pemilihan tersebut juga dilakukan oleh organisasi independen, Komisi Dalam Pemilihan Umum (KPU). Hal Ini berfungsi sebagai organisasi perencanaan pemilu. Pada tanggal 9 Desember 2015, pemerintah memutuskan untuk menyelenggarakan pemilu serentak di seluruh daerah yang masa jabatannya akan diperpanjang pada tahun 2015. Pada saat yang sama, 26 kota, 170 kabupaten, dan 8 provinsi akan menyelenggarakan pemilihan walikota dan bupati. Pilkada mendatang antara lain akan dilaksanakan di Kabupaten Malang. Tiga calon bersaing memperebutkan posisi teratas di Kabupaten Malang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang mendatang. Lima parpol di Kabupaten Malang Nasdem , Golkar , PKB, dan Demokrat mengajukan tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Rendra dan Sanusi, dan ketiga pasangan tersebut lolos dari tahap verifikasi. Partai PDIP Kabupaten Malang juga mengukung Masrifah Hadi dan Dewanti Rumpoko untuk maju berpasangan pada posisi bupati dan wakil bupati. Selain itu, pasangan ketiga, Nurcholis dan Muhammad Mufidz , merupakan calon dari jalur perorangan. Ketiga pasangan ini akan bersaing memperebutkan posisi bupati dan wakil bupati pada Pilkada Malang 2015.

Peningkatan keterlibatan politik terlihat jelas jika dilihat dari kualitasnya. Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya pemahaman akan pentingnya keterlibatan politik di antara berbagai pihak yang berpengaruh, termasuk namun tidak terbatas pada pemilih, masyarakat sipil, dan sektor bisnis. Ketiga elemen dasar ini saling bergantung pada agenda pemilu nasional dan lokal. Berdasarkan Rekap Pemilu 2015, total ada 1.020.227 surat suara yang dianggap sah. Ketidakpercayaan pemilih terhadap institusi politik menjadi akar rendahnya tingkat partisipasi pemilih

baru. Selain itu, gejala menurunnya keterlibatan politik, khususnya di kalangan pemilih pemula, menjadi kekhawatiran dalam pemilihan Wakil Bupati dan Bupati, begitu pula dengan hambatan dan kesulitan dalam penyelenggaraan pemilu bagi pemula. Partisipasi pemilu oleh pemilih pemula merupakan langkah penting dalam mendidik generasi berikutnya tentang politik. Pada pemilihan Bupati dan Bupati Walil mendatang, sebagai pemilih pemula, kami mohon agar anda dapat menggunakan suara anda dalam memberikan suara. Bagi pemilih pemula, terdapat sejumlah kendala yang dapat menghalangi mereka untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu berikutnya. Selain tidak tertarik dengan jangkauan pemilu KPU, pemilih pemula juga masih terlalu muda untuk terpengaruh oleh kepentingan tertentu. (*Surat Keputusan Hasil Rekapitulasi Pilbup Tahun 2015.Pdf* , nd) .

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilu Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Malang ?
2. Faktor apa saja yang menghambat KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu serentak tahun 2020 di Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilu Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilu Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Secara Praktis

1. Sebagai masukan bagi KPU Kabupaten Malang

2. Sebagai masukan dalam meningkatkan keterlibatan dalam pengelolaan Pemilik Pemula untuk memastikan beroperasi sejalan dengan proses dan tujuan yang telah ditetapkan, sebagai bagian dari eksekusi strategi.

B. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor permasalahan yang dapat diuraikan menjadi hasil dari penelitian, khususnya dalam penerapan Strategi KPU meningkatkan partisipasi pemilu pemula di Kabupaten Malang.

1.5 Definisi Konseptual

Untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan lapangan, definisi konseptual memberikan batasan pada variabel. Penelitian teoretis ini akan lebih mudah dipahami jika kita meluangkan waktu untuk menganalisis sejumlah faktor penentu konseptual.

1. Strategi

Menurut Marrus (2002:31) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat di capai, Selanjutnya Quinn (1999:10) menegertikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasikan sumber daya dimiliki pemerintahan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan , Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan sebuah lembaga, antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh.

Dari kedua pendapat di atas, maka strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana ini meliputi : tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam mempertahankan eksistensi dan menenangkan persaingan, terutama pemerintahan atau organisasi harus

memiliki keunggulan kompetitif. Hal ini seperti yang diungkapkan Ohmae (1999:10) bahwa strategi bisnis, dalam suatu kata, adalah mengenai keunggulan kompetitif. Satu-satunya tujuan dari perencanaan strategis adalah memungkinkan perusahaan memperoleh, seefisien mungkin, keunggulan yang dapat mempertahankan atas saingan mereka. Strategi koorperasi dengan demikian mencerminkan usaha untuk mengubah kekuatan pemerintahan relatif terhadap saingan dengan seefisien mungkin.

2. Partisipasi Politik

Huntington dan Nelson (Rahman 2002: 128), mendefinisikan: “Partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan warga negara preman (privat citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Dan pengertian tersebut, Huntingson dan Nelson memberi batasan partisipasi politik pada beberapa hal yaitu berupa kegiatan bukan sikap-sikap dan kepercayaan, memiliki tujuan mempengaruhi kebijakan publik dan dilakukan oleh warga negara preman” Di Indonesia partisipasi politik masyarakat dinilai relatif masih rendah. Karena itu upaya peningkatan partisipasi politik melalui pendidikan politik atau peningkatan fungsi-fungsi institusi politik lain, termasuk peningkatan kondisi sosial ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat perlu dibina atau dilaksanakan. Partisipasi politik sebagai suatu aktifitas, tentu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang adalah aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara dan bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah baik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya. Dalam masyarakat tingkat partisipasi politik cenderung bervariasi dengan status sosio-ekonomi. Mereka berpendidikan yang lebih tinggi, berpenghasilan yang lebih besar mempunyai status pekerjaan yang lebih tinggi biasanya lebih partisipatif daripada mereka yang miskin, tidak berpendidikan dan memiliki pekerjaan status rendah. Pembangunan

ekonomi memperluas proporsi peranan berstatus lebih tinggi di dalam masyarakat, meningkatkan kadar melek huruf, berpendidikan, makmur dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kelas menengah. Oleh sebab itu, bagian masyarakat yang partisipasi di bidang politik menjadi lebih banyak dengan adanya partisipasi politik, sehingga terlaksana pemerintahan yang demokratis dengan baik.

3. Pemilih pemula

Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Pemilih dalam setiap pemilihan umum didaftarkan melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara pemilihan umum. Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih yaitu 17 hingga 21 tahun. Pengetahuan mereka terhadap pemilu tidak berbeda jauh dengan kelompok lainnya, yang membedakan adalah soal antusiasme dan preferensi. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah:

1. WNI yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
2. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
3. Terdaftar sebagai pemilih.
4. Bukan anggota TNI/Polri (Purnawirawan / Sudah tidak lagi menjadi anggota TNI / Kepolisian).
5. Tidak sedang dicabut hak pilihnya
6. Terdaftar di DPT.
7. Khusus untuk Pemilukada calon pemilih harus berdomisili sekurangkurangnya 6 (enam) bulan didaerah yang bersangkutan.

Pentingnya peranan pemilih pemula karena sebanyak 20 % dari seluruh pemilih adalah pemilih pemula, dengan demikian jumlah pemilih pemula sangatlah besar, sehingga hak warga negara dalam menggunakan hak pilihnya janganlah sampai tidak berarti akibat dari kesalahan-kesalahan yang tidak diharapkan, misalnya jangan sampai sudah memiliki hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar atau juga

masih banyak kesalahan dalam menggunakan hak pilihnya, dll. Siapapun itu yang bisa merebut perhatian kalangan akan dapat merasakan keuntungannya. Lahirnya dukungan dari kelompok ini secara tidak langsung membawa dampak pencitraan yang sangat berarti. Setidaknya untuk pengamanan proses regenerasi kader politik kedepan, meskipun membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ketiadaan dukungan dari kalangan ini akan terasa cukup merugikan bagi target-target suara pemilu yang telah ditetapkan tiap-tiap parpol. Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun menjadi segmen yang memang unik, seringkali memunculkan kejutan dan tentu menjanjikan secara kuantitas. Disebut unik, sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme tinggi, relatif lebih rasional, haus akan perubahan dan tipis akan kadar polusi pragmatisme.

4. Pilkada Serentak

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (Pilkada) di Indonesia telah menjadi agenda rutin sejak tahun 2005. Di satu sisi, Pilkada diapresiasi sebagai salah satu mekanisme positif dalam konteks penguatan demokrasi lokal (Sulistiyanto and Erb, 2009, p. 3; Hanif and Pratikno, 2012, p. 89). Namun, di sisi lain, pelaksanaannya masih diwarnai oleh berbagai permasalahan sebagaimana dikritisi banyak kalangan (Choi, 2007; Mboi, 2009; Aspinall and As'ad, 2016). Salah satu yang menjadi sorotan dalam setiap perhelatan Pilkada adalah munculnya fenomena "politik kekerabatan" yang secara umum dipahami oleh banyak pihak sebagai fenomena kemunculan dan kemenangan pasangan pemimpin daerah yang memiliki kekerabatan dengan seseorang atau sejumlah orang dalam lingkaran kekuasaan di berbagai institusi politik atau pemerintahan, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah. Data menunjukkan bahwa dibandingkan dengan perhelatan Pilkada sebelumnya, politik kekerabatan pada Pilkada Serentak 2020 menunjukkan peningkatan cukup signifikan. Pasca KPU RI merilis daftar pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2020, Lembaga Riset Nagara Institute (2020) mencatat terdapat 124 kandidat pada Pilkada Serentak 2020 yang terafiliasi dengan dinasti politik, dengan perincian sebagai berikut:

- a. 7 calon bupati dan 30 calon wakil bupati;
- b. 20 calon walikota dan 8 calon wakil walikota;
- c. 5 calon gubernur dan 4 calon wakil gubernur.

Catatan menarik lainnya adalah dari total 124 kandidat tersebut, 57 perempuan dan 29 di antaranya adalah istri dari kepala daerah sebelumnya. Kenawas (2020) mengkonfirmasi meningkatnya kandidat yang berafiliasi dengan politik kekerabatan pada akhirnya akan semakin meningkatkan pertumbuhan politik kekerabatan yang menduduki pos-pos strategis di Daerah. Kenawas mencatat pertumbuhan 300 persen dari politik kekerabatan yang memenangkan Pilkada pada dalam kurun waktu 2015-2018, yakni sejumlah 117, dibandingkan dengan tahun 2013 sejumlah 39. Studi Nagara Institute (dalam The Indonesian Institute, 2020) juga mengkonfirmasi bahwa sampai dengan Pilkada 2018, dari 514 Daerah Otonom di Indonesia, 80 (14,78%) diantaranya terpapar politik kekerabatan. Tren politik kekerabatan ini diperkirakan juga akan naik seiring dengan kemenangan para kandidat yang terpapar politik kekerabatan ini dalam Pilkada Serentak 2020. Secara agregat, pada akhirnya pemenang Pilkada 2020 yang terpapar politik kekerabatan ini, akan semakin meningkatkan jumlah pemimpin daerah otonom yang terpapar politik kekerabatan.

1.6 Definisi Operasional

1. Rencana Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang Tahun 2020 untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula, sekaligus.
 - a. mendorong lebih banyak orang untuk memberikan suara dengan memberikan peluang interaksi bagi pemilih baru.
 - b. memaksimalkan dampak platform online
 - c. KPU Road to School
2. Tantangan yang Dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang Tahun 2020 Dalam Tujuan Meningkatkan Jumlah Pemilih Pertama.

1.7 Metode Penelitian

1. Metode

Metode dalam penelitian adalah serangkaian langkah Dalam penelitian kualitatif, "penelitian" mengacu pada tindakan yang dilakukan untuk mengidentifikasi suatu masalah, mengumpulkan informasi yang relevan, dan menarik kesimpulan; "metode penelitian" mengacu pada prosedur khusus yang

diikuti untuk memastikan pendekatan yang aman dan metodis untuk memecahkan masalah yang ada.

Istilah “studi kualitatif” mengacu pada penelitian yang berfokus pada hal-hal seperti kasus, koneksi, aktivitas, setting, atau jenis materi lainnya. Dengan kata lain, penelitian kualitatif lebih menekankan pada penyediaan deskripsi yang rinci dan komprehensif mengenai tindakan atau keadaan yang dipertanyakan. Yang lebih penting daripada membuat perbandingan, memperlakukan hal tertentu, atau menjelaskan sikap atau perilaku seseorang adalah apa yang sebenarnya terjadi (Fadli 2021).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjadi tempat pemecahan masalah penelitian melalui proses penelitian. Lokasi penelitian tergantung pada bidang keilmuan sebagai latar belakang penelitian atau pemusatan ilmu. Lokasi penelitian harus jelas agar penelitian dapat dilakukan secara akurat dan efektif (Sugiyono, n.d.). Lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Kantor KPU Kab Malang.

3. Jenis penelitian

Penelitian sederhana ini menggunakan penelitian praktik lapangan (*field research*) yang diartikan sebagai pengamatan langsung untuk memperoleh informasi yang di perlukan, Ketika penelitian ingin meneliti bagaimana strategi KPU Kab Malang dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula, maka harus menggunakan metode penelitian lapangan untuk memperoleh hasil yang akurat dan jelas.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung di peroleh oleh hasil wawancara dan observasi yang di lakukan oleh peneliti kepada petugas atau sembar pertamanya dengan mendahulukan data utama dan pokok. Sehingga pada penelitian ini di lakukan wawancara dan observasi kepada KPU Kab Malang. Sehingga mampu memperoleh informasi mengenai strategi KPU meningkatkan partisipasi pemilih pemula.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan bertujuan selainya menyesuaikan masalah yang sedang diteliti, data ini mampu di temukan dengan cepat dan di peroleh melalui pengumpulan dan pengelolaan data bersifat dokumen atau dalam bentuk yang sudah jadi, data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan dan pengelolaan data berupa jurnal, buku, skripsi dan data pendukung lainnya yang di peroleh untuk menunjukan penelitian dari sumber informasi yang di kumpulkan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut diharapkan mampu melengkapi yang dibutuhkan.

a. Observasi (pengamatan)

Teknik observasi untuk mendapatkan data dalam bentuk dokumen atau tentang perilaku mengejar-mengejar dan sarana prasarana. Dalam setiap pengamatan data yang diperoleh peneliti berkaitan dengan dua hal penting yaitu informasi (contohnya cara penelitian, apakah alat yang digunakan sudah sesuai, dan apa yang terjadi serta konteksnya berkaitan). Dimensi waktu dan tempat tertentu jika informasi keluar dari konteks maka informasi tersebut akan kehilangan maknanya. Observasi dilakukan di wilayah Kantor KPU Kab Malang.

b. Wawancara

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah format wawancara yang terstruktur dan lebih formal. Pertanyaan tentang pandangan, sikap dan keyakinan terhadap objek dan subjek atau informasi lainnya dapat dipertanyakan secara bebas kepada subjek. Dengan informan yaitu pengurus KPU Kab Malang untuk mengetahui strategi apa yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi pemili pemula.

c. Dokumentasi

Dokumentasi meruapakn suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen – dokumen, baik dokumen tertulis dari kejadian yang telah terjadi, gambar maupun elektronik,

dokumen disini berarti segala macam keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis. Dokumentasi ini juga didapatkan melalui teknik *survey* sehingga dapat dijadikan sebagai data pendukung dari penelitian penulis. Dokumentasi dalam penelitian ini akan menghasilkan gambar – gambar penting terkait topik magang riset.

6. Teknik Analisis Data

Menurut pendapat Miles dan Huberman (1984) bahwa analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data dilakukan secara interaktif berlangsung secara terus menerus sampai tuntas

a. Reduksi Data

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, mencari tema dan pola. Maka, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga memudahkan penelitian untuk melakukan pengumpulan dan pencarian data lebih lanjut bila diperlukan. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah hasil penelitian. Oleh karenanya, jika seorang peneliti menemukan segala sesuatu yang dianggap asing, tidak diketahui, dan tidak teratur. Ketika melakukan penelitian, hal inilah yang harus diperhatikan oleh peneliti saat melakukan reduksi data. Reduksi data adalah proses berfikir sendiri yang membutuhkan keluasan dan kedalaman kebijaksanaan dan wawasan. Bagi peneliti baru dapat berdiskusi dengan teman atau orang lain yang dianggap ahli saat melakukan reduksi data. Melalui diskusi ini akan dikembangkan wawasan peneliti sehingga dapat mereduksi data dengan penemuan – penemuan penting dan nilai pengembangan teoretis.

Reduksi data pada penelitian ini difokuskan pada analisis yang terjadi dilapangan atau penemuan fakta dilapangan terkait strategi KPU Kab Malang meningkatkan Partisipasi pemilih pemula . Selain itu juga mengumpulkan data analisis terkait faktor apa yang menjadi hambatan untuk kemenangan.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang disajikan dalam deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, diagram alur, dan serupa. Pada

hal ini, Miles dan Huberman (1984) menunjukkan bahwa di masa lalu, bentuk data yang sering ditampilkan yang digunakan untuk data penelitian kualitatif adalah teks naratif (Sugiyono, n.d.).

Memperkenalkan data juga dapat memahami apa yang terjadi dan langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk menganalisis hasil penemuan di lapangan. Langkah ini diambil untuk mempermudah memberikan gambaran atau bagian data dan fakta yang ditemukan di lapangan. Penyajian data dapat lebih akurat mengevaluasi penelitian ini menganalisis penemuan atau fakta di lapangan. Kesimpulan penelitian ini sesuai dengan data dan fakta di lapangan, kemudian menemukan representasi dari data tersebut yang berupa gambaran umum dari deskripsi KPU Kab Malang

c. Penarikan Kesimpulan

Pendapat Miles dan Huberman, terkait kesimpulan awal, masih bersifat sementara serta dapat berubah jika tidak ada bukti yang kuat untuk mendukungnya pada tahap pengumpulan data selanjutnya (Sugiyono, n.d.). akan tetapi, apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti yang kuat, maka kesimpulan yang disajikan merupakan kesimpulan yang kredibel.